

**STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKSANAKAN
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DISTRIK DEKAI KOTA
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA**

Hengki lagowan

NPP : 30.1617

*Asal pendaftaran kabupaten Yahukimo Provinsi Papua
Program studi Praktik perpolisian tata pamong*

Email : hengkilagowan@gmail.com

ABSTRACT {in English}

Problem Statement/Background (GAP): *this study explained that the many problems in Yahukimo Regency precisely in the Dekai city market of Batalaiworu subdistrict where there are many street vendors who carry out activities in the area so as to cause many problems such as cleanliness, order and peace of the community* **Purposein:** *the area, so the strategy of the Pamong Praja Police Unit in Yahukimo Regency is needed to carry out the control of street vendors, using research* **methods:** *Descriptive research methods with qualitative approaches, while researchers collect data using interview techniques, observations and documentation.*

Result:: *So that the result of the research that has been done by researchers is the lack of public understanding of the applicable regulations so it is not surprising that there are people who fight against the Pamong Praja Police Unit so that there is a conflict between the two sides.*

Conclusion: *The Pamong Praja Police Unit from year to year has made progress on the quality of human resources of the pamong praja policeunit so that in implementing this strategy can run well. Researchers expectstreet vendors to be disciplined and not cause any more problems and persuasive actions of pamong police units in order to minimize the numberof people who fight so that they can create a harmonious market environment in Dekai city subdistrict Yahukimo County.*

Keywords : *Strategy, Pamong Praja Police Unit, Street Vendor*

ABSTRAK{in Bahasa}

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam penelitian ini menerangkan bahwa banyaknya permasalahan di Kabupaten Yahukimo tepatnya di Disrik Dekai Kota dimana banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas dikawasan tersebut sehingga menimbulkan banyak permasalahan seperti kebersihan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dikawasan tersebut, **Tujuan:** sehingga diperlukannya strategi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Yahukimo untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima tersebut, dengan menggunakan **Metode:** penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi.

Sehingga **Hasil dari temuan:** yang telah peneliti lakukan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga tidak heran jika ada oknum masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sehingga muncul konflik antara kedua belah pihak.

Kesimpulan : Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun ke tahun sudah melakukan perkembangan terhadap kualitas sumber daya manusia satuan polisi pamong praja agar dalam melaksanakan strategi ini bisa berjalan dengan baik. Peneliti mengharapkan pedagang kaki lima dapat ditertibkan dan tidak menimbulkan masalah lagi dan tindakan persuasif satuan polisi pamong agar dapat meminimalisir oknum yang melakukan perlawanan sehingga dapat terciptakan lingkungan pasar yang harmonis di Distrik Dekai kota Kabupaten Yahukimo.

Kata Kunci :Strategi, Satpol- PP, Pedagang Kaki Lima

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran pemerintah Daerah dalam perencanaan Pembangunan Daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah karena pemerintah Daerah memegang peran untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut urusan pemerintahan umum. dan Urusan pemerintahan konkuren

Yahukimo sebagai daerah otonomi terletak di Provinsi Papua, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan memiliki konkuren. Kabupaten Yahukimo memiliki dua jalur pemasukan dan pengeluaran dan dalam proses pemutaran perdagangan ekonomi di Kabupaten Yahukimo yaitu:

1. Yang pertama Melalui pesawat dari jayapura
2. Yang kedua melalui kapal dari makasar, surabaya timika dan merauke membawa bahan pokok dan lain lain melalui jalur laut dan mengikuti sugai masuk di kabupaten Yahukimo

Dua hal ini menjadi faktor utama dan menjadi faktor penting dalam perdagangan kabupaten Yahukimo, dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Yahukimo dua hal ini sangat membantu dalam pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang membantu dalam perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang baik di zona tertutup maupun bebas kedua zona ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat menega dibawa ,terutama sempitnya lapangan pekerjaan.

Namun tidak di banta lagi bawah zona bebas ini sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sehingga dapat menimbulkan permasalahan antara masyarakat pejalan kaki, masyarakat pengendara bermotor maupun bermobil dengan pedagang kaki lima di Kabupaten Yahukimo.

Zona bebas merupakan pilihan para PedanganKaki Lima, dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Peyebab munculnya Pedagan kaki lima yaitu ketidak mampuan zona bebas dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang terus meningkat salah satufaktornya karena banyaknya peningkatan lulusan yang berpendidikan sehingga membutuhkan lowongan pekerjaan yang lebih banyak.(Hariyani2019).

Perilaku ini dapat di hadapan pemerintah cukup mengganggu kebersihan dan keindahan kabupaten Yakukimo, melihat hal tersebut pemerintah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua mempertimbangkan untuk melakukan tindakan yang tegas kepada seluruh pelaku pedagang kaki lima, dengan mengusir usahanya yang dilakukan oleh PKL guna untuk ketertiban, kebersihan, ketentraman dan perkembangan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

Kabupaten Yahukimo distrik Dekai kota terdapat pasar liar atau pedagang kaki lima, yang berada di pinggiran jalan, maupun depan pasardimana pasar liar ini, sangat mengganggu aktivitas ketertiban di lingkungan masyarakat. Di sepanjang jalan terdapat banyak sampah, yang mengganggu aktivitas transportasi sepanjang jalan pasar .Setiap tahunnya menjelang tahun baru sering terjadi macet pada jalan kawasan pasardimana berdasarkan data

yang telah diperoleh dari kepala satuan polisi pamong praja melalui telpon pasar dekai kota ada sekitar 50 pedagang kaki lima yang memenuhi pinggir jalan baik di trotoar maupun ditengah jalan disepanjang pasar yang berjarak kurang lebih 250 meter, namun jumlahnya tidak pasti dikarenakan, pedagang kaki lima cenderung berubah-ubah, tergantung pada situasi, dan selalu ada oknum dari pasar yang melakukan perlawanan terhadap satuan polisi pamong praja ketika melakukan penertiban.

1.2. Kesenjangan Masalah yang di ambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kabupaten Yahukimo, melakukan perpanjangan kontrak honorer berjumlah 100 anggota, satuan polisi pamong praja. Hal ini di ungkapkan Kepala satuan polisi pamong praja (Kasat Pol-pp) mengatakan bahwa satuan polisi pamong praja hanya ada di 10 kecamatan sedangkan jumlah kecamatan ada 51 itupun kinerjanya belum maksimal sepertinya harus BKO 100 orang anggota baru agar dapat maksimal. Jika kita melihat dari budaya lingkungan masyarakat kabupaten Yahukimo yang mana penduduknya, masih kurang pemahaman akan peraturan daerah maka operasi ketertiban umum ini akan sulit untuk memberantas para pelaku, hal ini dikarenakan budaya dan lingkungan masyarakat sangat keras dan sulit untuk menaati aturan sehingga akan terus melakukan perdagangan liar di Distrik Dekai Kota Kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan permasalahan, yang terjadi maka satuan polisi pamong praja harus mempersiapkan strategi terbaik, untuk melakukan penertiban dan mengurangi penyebaran pasar liar yang ada di Distrik Dekai Kota Kabupaten Yahukimo. Oleh karena itu, penulis mengangkat ke dalam sebuah penelitian yang berjudul "STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKSANAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DISTRIK DEKAI KOTA KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA"

1.3. Penelitian Terdahulu

a. Muhamadarfan printak (2021) Strategi satuan polisi pamong praja dalam menertipkan pedagang kaki lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan kendala yang di alami dalam penertiban PKL di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Hasil dalam penelitian ini, telah ditemukan adanya Strategi yang digunakan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban yaitu dengan melakukan tindakan preventif, tindakan yang bersifat represif, dan tindakan setelah PKL di pindahkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode kualitatif dengan pendekatan

deskriptif, karena hasilnya menganalisis.

b. Rudy mashudi Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dijalan Dewi Sartika Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi dan konsep satuan polisi pamong praja dalam menyelesaikan permasalahan demi kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Mewujudkan Perda dalam rangkamengoptimalkan pola mengstandarisasi segala bentuk tugas-tugas Satpol PP yang dijalankan dengan baik oleh petugas terkait pengaturan terhadap PKL agar tepat sasaran dan tujuan. Teori yang digunakan sama yaitu SWOT, degan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data dan penarikan kesimpulan.

c. Zaili Rusli Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekan baru). Tujuan penelitian ini untuk penertiban aturan untuk keamanan dan ketertiban. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah menerapkan peraturan keamanan dan penertiban dalam melakukan usaha pedagang kaki lima di kota pekan baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Deskriptif Kualitatif.

1.4. Pernyataan kebaharuan ilmiah

Perbedaanya Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada strategi satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di distrik dekai kota kabupaten Yahukimo provins papua agar Terwujudnya Ketertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Lingkungan Pasar Dan Kota Distrik Dekai Kota Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. Persamaanya yaitu tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL)

1.5. Tujuan

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan stategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Distrik Dekai Kota Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua serta mendeskripsikan dan menganalisisa upaya yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan strategi penertiban pedangang kaki lima di Distrik Dekai Kota Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

II. METODE

Pendekatan penelitian dibedakan menjadi dua yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatankuantitatif. Dan pada penelitian yang berjudul “strategi satuan poisi pamongpraja daiam penertiban pedagang kaki iima di distrik dekai kota kabupaten Yahukimo provinsi Papua peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sugiyono (2011:4) menyatakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dengan maksud untuk memahami suatu fenomenal sosial tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan berusaha menggambarkan serta menjelaskan kondisi objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membuat gambaran kompleks, meneliti kata- kata laporan terinci dari informan, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Marshal (dalam sugiyono, 2011:13) mendefinisikan kualitatif sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas dalam interaksi manusia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana pelaksanaan strategi satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di distrik Dekai Kota Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai strategi satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Distrik Dekai kota kabupaten Yahukimo provinsi papua yang berpedoman pada indikator strategi. Maka dapat di analisis dan dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

3.1.1 Faktor kekuatan (*strength*)

Faktor-faktor kekuatan ini didapatkan dari hasil observasi lapangan berupa pengumpulan informasi dan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti mengidentifikasi faktor-faktor internal apa saja yang dapat menjadi kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo dalam penertiban PKL. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait faktor-faktor internal yang dapat menjadi kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo :

1. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima sejalan untuk Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Visi Kabupaten Yahukimo 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Yahukimo yang Cerdas, Sehat, Maju, Lestari, Rukun dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2025”. Adapun misi Kabupaten Yahukimo untuk mewujudkan visi tersebut sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- b. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.

- c. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah
- d. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- e. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama dalam kehidupan social
- f. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya penertiban PKL ini memang tidak terpampang jelas di visi misi daerah Kabupaten Yahukimo. Namun pada dasarnya tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu salah satunya membantu Kepala Daerah dalam bidang trantibum sehingga visi misi daerah dapat terlaksana dengan baik. upaya penertiban PKL ini juga dilakukan agar tertibnya PKL sehingga tercipta tata kota yang tertib, tentram, aman, indah, dan bersih.

2. Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja,

Komitmen ini ditunjukkan dengan adanya dilakukan patroli dan pengawasan yang dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali. Selain itu, Komitmen ini ditunjukkan dengan adanya penertiban yang sifatnya insidental salah satunya yaitu dari keluhan masyarakat, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo dengan cepat merespon hal tersebut.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang Jelas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo telah mengatur SOP dalam melakukan kegiatan penertiban PKL di Kabupaten Yahukimo. Kemudian, SOP ini dijadikan pegangan dan pedoman bagi Satpol PP Kabupaten Yahukimo dalam penertiban PKL di Kabupaten Yahukimo. Dan berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan SOP yang telah diatur.

3.1.2 .Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Refocusing Anggaran

peneliti menyimpulkan bahwa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo dalam tiga tahun terakhir ini lebih dialokasikan untuk penanganan kasus covid. Sehingga untuk penertiban PKL ini tidak memiliki anggaran khusus. Hal ini menjadi kelemahan dalam penertiban PKL di Kabupaten Yahukimo.

2. Sarana Prasarana Kurang Memadai

sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo kurang memadai dan terdapat sarana prasarana yang tidak tersedia. Terdapat banyak kondisi sarana prasarana yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. kemudian untuk sarana prasarana yang tidak tersedia yaitu transportasi angkutan baik untuk angkutan transportasi personil maupun angkutan dalam pelaksanaan penertiban. Dalam pelaksanaan penertiban ini diperlukan truk untuk mengangkut gerobak, sampah sisa penertiban, dan hal-hal lain yang melanggar. Untuk solusi dalam hal ini dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo dengan menurunkan angkutan milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo.

3. Kondisi Sumber Daya Aparatur yang Kurang Memadai

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Satpol PP Kabupaten Yahukimo, peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal jumlah personil, Satpol PP Kabupaten Yahukimo dapat dikatakan telah mencukupi. Namun, personil Satpol PP Kabupaten Yahukimo masih banyak yang belum paham terkait tugas dan kewajibannya sebagai anggota Satpol - PP. Hal ini juga dapat terlihat dari tabel 4.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA/SMK merupakan jumlah pegawai terbanyak di Satpol PP Kabupaten Yahukimo yaitu sebanyak 30 orang. Hal ini dapat menjadi kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo karena masih banyak anggota personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo yang belum memiliki kompetensi yang cukup baik.

3.2. Faktor Peluang (Opportunities)

1. Dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait

Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat adanya dukungan dari OPD terkait yang membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo dalam menertibkan PKL di Kabupaten Yahukimo. Adapun Organisasi Perangkat Daerah tersebut yaitu Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Yahukimo, serta Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Yahukimo.

2. Dasar Hukum

peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Yahukimo ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo didukung dengan adanya Perda yang mengatur tentang penataan PKL di Kabupaten Yahukimo yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Yahukimo.

Hal ini juga diperkuat dalam pasal 12 ayat (2) yang berbunyi Penertiban PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan bila di pandang perlu melibatkan dinas atau instansi terkait. Sehingga perlu untuk Polisi Pamong Praja dalam hal unsur penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Yahukimo.

3. Kekuatan Pemerintahan

peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kesepakatan terkait teknis berjualan di Jalan di depan sepanjang jln trotowar jalan Kabupaten Yahukimo. Hal ini dilakukan karena belum adanya tempat untuk relokasi PKL. Dan hal ini juga sudah menjadi solusi agar PKL dapat tetap berjualan dan memenuhi kebutuhan hidupnya tapi dengan diatur dan diawasi jam berjualannya sehingga tertib.

3.3 . Faktor Ancaman (Threats)

1. Belum Ada Tempat Untuk Relokasi PKL

peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo belum menyediakan tempat untuk relokasi PKL. Penertiban yang dilakukan hanya sebatas penertiban saja tanpa ada tahap relokasi PKL. Kemudian tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu pengawasan agar PKL tidak berjualan ditempat yang tidak seharusnya lagi.

2. Belum Ada Pemanfaatan Teknologi

peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya pemanfaatan teknologi khusus seperti sistem komunikasi khusus untuk lebih cepatnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo melakukan penertiban PKL ini. Hal ini dapat juga menjadi faktor ancaman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo. Namun, sudah ada rencana untuk membuat dan memanfaatkan teknologi tersebut.

3. Kepatuhan PKL yang Rendah

peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesadaran PKL yang rendah terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Seperti dalam halnya penertiban PKL ini, setelah di tertibkan dan pengawasan yang dilakukan telah berkurang, selang beberapa minggu PKL tersebut akan muncul lagi ditempat yang tidak diperbolehkan.

3.4. Diskusi temuan menarik lainnya (opsional)

Peneliti menemukan faktor penghambat Strategi satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di distrik dekai kota kabupaten yahukimo provins papua yakni, Refocusing Anggaran, Sarana Prasana Kurang Memadai serta Kondisi Sumber Daya Aparatur yang Kurang Memadai

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian strategi Satpol PP Kabupaten Yahukimo dalam penertiban PKL di Kabupaten Yahukimo dengan menggunakan Teori SWOT oleh Rangkuti, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Internal yang ada pada Satpol PP Kabupaten Yahukimo dalam penertiban PKL di Kabupaten Yahukimo yaitu sebagai berikut.

a. Faktor Kekuatan

- ✓ Upaya Penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Yahukimo sejalan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Yahukimo.
- ✓ Komitmen Seluruh Personil Satpol PP
- ✓ Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang Jelas

b. Faktor Kelemahan

- ✓ Refocusing Anggaran
- ✓ Sarana Prasarana Kurang Memadai
- ✓ Sumberdaya Aparatur Kurang Memadai

2. Faktor Eksternal yang ada pada Satpol PP Kabupaten Yahukimo dalam penertiban PKL di Kabupaten Yahukimo sebagai berikut:

a. Faktor Peluang

- ✓ Dukungan OPD terkait
- ✓ Terdapat Perda yang Mengatur PKL
- ✓ Terdapat Kesepakatan Pemda dengan PKL terkait teknis berjualan

b. Faktor Ancaman

- ✓ Belum Ada Tempat Untuk Relokasi PKL
- ✓ Belum Ada Pemanfaatan Teknologi
- ✓ Kepatuhan PKL Rendah

3. Dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Yahukimo berada pada Posisi Strategi. Kemudian diperoleh beberapa alternatif strategi Satpol PP Kabupaten Yahukimo dalam Penertiban PKL di Kabupaten Yahukimo yaitu sebagai berikut.

- a. Meningkatkan Pembuatan Program Penertiban PKL berkelanjutan dengan memperkuat dukungan OPD terkait.
- b. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Satpol PP dengan membentuk tim khusus penertiban PKL.
- c. Memfasilitasi Tempat Untuk Relokasi PKL serta Memberikan Pembinaan Terhadap PKL.
- d. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Teknologi Satpol PP Kabupaten Yahukimo.

Keterbatasan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian peneliti memiliki hambatan keterbatasan waktu dan biaya transportasi . peneliti juga melaksanakan penelitian di satuan polisi pamong praja daerah kabupaten Yahukimo serta Distrik Dekai Kota mengenai Strategi satuan polisi pamong prajadalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di distrik dekaikota kabupaten yahukimo provins papua

Arah Masa Depan Penelitian (future work). peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan untuk itu peneliti menyarankan bahwa agar dapat di lakukan peneliti selanjutnya pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Strategi satuan polisi pamong prajadalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di distrik dekaikota kabupaten yahukimo provins papua

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala satuan polisi pamong praja kabupaten Yahukimo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan juga Masyarakat Distrik Dekai, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Fred, R David. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*,. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Galavan, R. (2014). *Doing Business Strategy*. Ireland: NuBooks. Kerlinger. 2006. *Asas–Asas Penelitian Behaviour*. Edisi 3, Cetakan 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Kim, Jong-Hyeong. 2014.

Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*: Cetakan Pertama. Yogyakarta. Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Muh. Arfah parintak. (2021), *Strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kecamatan Belopa utara kabupaten Luwu.*

Muhadam labolo. (2006). *Memahami ilmu Pemerintahan.* PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Poerwadarminta W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* PN Balai Pustaka, Jakarta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Dan Pengembangan.* Bandung: ALFABETA.

Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suwarsono, Muhammad. (2012). *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik.* Pusat Studi Metropolitan.

